

Tujuh Caleg DPRD Banten Mantan Napi, Lima di Antaranya Koruptor

SERANG (IM) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten menemukan adanya tujuh orang mantan narapidana alias napi yang menjadi calon legislatif (caleg) DPRD Banten.

Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal mengungkapkan, dari tujuh orang itu terdapat lima orang di antaranya merupakan mantan narapidana yang terjerat kasus korupsi. "Ya ada tujuh orang napi, di antaranya ada napi korupsi," kata Ali Faisal, Kamis (7/9).

Ali mengatakan, baik para napi yang terjerat kasus pidana maupun korupsi, ketujuh sudah memenuhi persyaratan untuk maju sebagai caleg DPRD Banten. "Sudah sesuai," singkatnya.

Sementara itu, Anggota KPU Banten, Akhmad Subagja mengatakan, pihaknya sudah menetapkan 1.337 caleg yang masuk pada data calon sementara (DCS).

Ia pun tidak membantah terdapat tujuh orang mantan napi yang masuk dalam data DCS itu. Kata dia, mereka

sudah memenuhi persyaratan sebagai caleg.

"Semuanya sudah sesuai, mereka sudah bebas dari hukumannya dan bisa menjadi caleg sesuai peraturan yang berlaku," ungkapnya.

Katanya, ketujuh orang itu juga sudah melewati masa jeda pasca hukuman yang dijatohi oleh mereka.

"Mereka sudah melewati masa jeda selama lima tahun pasca hukuman," ucapnya.

Lebih jauhnya, Oha sapaan akrabnya, baik data caleg yang merupakan mantan napi maupun caleg lainnya masih bisa berubah. Pimpinan partai politik (Parpol) masih bisa merubah data calegnya sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan dilakukan pada bulan November 2023 nanti.

"Jadi nanti ada masa pencermatan DCT dari tanggal 24 September sampai 3 Oktober 2023. Dalam masa pencermatan itu, parpol bisa menganti caleg, menggeser nomor urut atau dapil tapi harus seperesetujuan pimpinan parpol," pungkasnya. ● **pra**

PAMERAN FOTO BIOGRAFI CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE

Warga melihat koleksi foto biografi Christiaan Snouck Hurgronje dalam pameran di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Banten di Serang, Banten, Kamis (7/9). Pameran yang digelar Galeri Foto Jurnalistik ANTARA bekerja sama dengan KITLV-Jakarta itu akan berlangsung hingga 20 September 2023.



Presiden Bank Dunia Antusias Ikuti Kelas Ibu Hamil

Kunjungan Presiden Bank Dunia, Ajay Banga didampingi sang istri, Ritu Banga, dan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dalam rangka memastikan apakah dana yang dikucurkan oleh Bank Dunia di bidang kesehatan, utamanya dalam rangka penurunan stunting berhasil menyentuh masyarakat hingga yang paling bawah.

TANGERANG (IM) - Presiden Bank Dunia, Ajay Banga antusias mengikuti kelas ibu hamil dalam kunjungannya di Kelurahan Serdang Kulon, Tangerang, Banten, pada Kamis (7/9).

Kunjungan Ajay Banga kali ini didampingi oleh sang istri, Ritu Banga, dan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dalam rangka memastikan apakah dana yang dikucurkan oleh Bank Dunia di bidang kesehatan, utamanya dalam rangka penurunan stunting berhasil menyentuh masyarakat hingga yang paling bawah.

"Saya sangat senang melihat ibu-ibu di sini aktif, tenaga kesehatan juga cukup mumpuni untuk memberi penjelasan tentang kehamilan, atau informasi-informasi lain yang dibutuhkan oleh para ibu," kata Ajay di sela kunjungannya.

Ajay bahkan cukup antusias bertanya kepada tenaga kesehatan yang sedang memberikan kelas ibu hamil, apakah ada juga fasilitas sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat (selain ibu hamil) yang membutuhkan informasi tentang kehamilan.

"Kalau ada keinginan bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang kehamilan, mereka harus kemana, dan berapa kali Anda sebagai tenaga kesehatan datang ke sini untuk memberikan penyuluhan?" tanya Ajay.

Pertanyaan Ajay ini pun mendapatkan respons dari Menkes Budi, yang menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah memiliki program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

"Jadi untuk mereka yang ingin mendapatkan informasi, tak hanya kehamilan, tetapi juga tentang kesehatan secara

umum, kita punya program kader BKB, BKR, dan BKL, masyarakat bisa mendapatkan informasi kepada para kader ini. Lalu, minimal setiap sebulan sekali, para nakes akan melakukan sosialisasi kepada para ibu hamil," jawab Menkes.

Ajay juga mengapresiasi penggunaan teknologi yang telah digunakan oleh para kader untuk menyosialisasikan setiap kegiatan pos pelayanan terpadu, maupun kelas-kelas ibu hamil atau remaja.

"Tadi pak Menkes sudah menunjukkan ke saya, mereka punya grup di aplikasi Whatsapp, bahkan tadi juga ada satu pesan dari warga yang ditunjukkan, mereka sudah buat janji untuk bertemu di sini dan menyambut saya bersama jajaran,"

katanya sambil terkekeh. Ia pun mengapresiasi para kader kesehatan yang bergerak secara sukarela dengan panggilan hati untuk membantu para ibu dan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang kesehatan.

Sebagai informasi, Bank Dunia telah menyetujui program untuk menyediakan dukungan tambahan untuk Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan gizi untuk remaja perempuan, perempuan hamil, serta anak-anak untuk mempercepat penguangan stunting pada anak di bawah lima tahun.

Melalui program Bank Dunia Investing in Nutrition and Early Years (INEY), pada tahap

satu di tahun 2018 dana sebesar 400 juta US Dollar sudah tersalurkan untuk Indonesia di bidang kesehatan.

Sedangkan untuk INEY tahap dua di tahun 2023, pendanaan senilai 600 juta dolar akan diberikan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Bank Dunia.

Dukungan Bank Dunia terhadap sektor gizi Indonesia merupakan komponen penting pada Kerangka Kerja Kemitraan Kelompok Bank Dunia untuk Indonesia tahun 2021-2025, yang berfokus pada beragam prioritas pemerintah untuk mempercepat pembangunan modal manusia. ● **pp**

Satgas Pencemaran Udara Periksa Dua Pabrik di Tangerang

TANGERANG (IM) - Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Pencemaran Udara Polda Metro Jaya memeriksa dua pabrik milik PT Deli-food Sentosa Corpindo dan PT Hankel Kreasindo di kawasan Industri Pasir Jaya, Kota Tangerang, Banten, Rabu (6/9). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah polutan yang dilepaskan dua pabrik itu sudah memenuhi ketetapan atau dalam batas aman. "Tadi telah dilakukan pengecekan, apakah pembakaran yang di-

lakukan di PT DSC dan PT HK ini dilakukan sempurna atau tidak, bisa di lepas ke udara atau tidak," ujar Ketua Satgas Polusi Udara Nurcholis dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9).

Satgas telah mengambil sampel dari tiap-tiap pabrik dan akan diuji di laboratorium. "Hasilnya nanti akan diketahui melalui proses laboratorium," imbuhnya.

Nurcholis mengatakan Satgas Polusi Udara menargetkan menyambangi pabrik-pabrik yang menggunakan bahan ba-

kar batubara sebagai sumber tenaga listrik mereka. Selain memeriksa pabrik, satgas juga melakukan uji emisi terhadap kendaraan roda dua maupun roda empat.

"Kita juga mengecek kendaraan bermotor dengan uji emisi. Setiap hari satgas melakukan uji emisi terhadap gas buang dari motor dan mobil. Secara internal di kedinasan Pemerintah khususnya di Polri sendiri telah kita cek lebih dulu," terangnya. ● **pp**

Penyusunan RAPBD 2024 Jadi Prioritas Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin Saat Ini



Wki Ketua DPRD Jabar, Sadar Muslihat.

BANDUNG (IM) - Komisi I DPRD Jawa Barat berharap Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin segera melanjutkan program-program dan pekerjaan gubernur sebelumnya.

Salah satunya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jabar Tahun Anggaran (TA) 2024.

Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat, Sadar Muslihat mengatakan, saat ini yang paling penting adalah proses penyusunan RAPBD Jabar TA 2024 jangan tertunda karena pergantian Gubernur definitif, Ridwan Kamil ke Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin persis di tengah proses penyusunan RAPBD Jabar TA 2024.

Selain itu, Komisi I DPRD Jawa Barat berharap Bey Machmudin bisa menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur Jabar dengan baik dan sesuai aturan yang ada. "Tentu harapan kita (Komisi I DPRD Jawa Barat)

apa yang ditinggalkan (pekerjaan rumah) oleh gubernur definitif bisa dikerjakan oleh Pj Gubernur Jabar, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai aturan yang ada," harap Sadar Muslihat, Bandung, Rabu (6/9).

Mengingat gubernur definitif dengan Pj berbeda tambah Sadar Muslihat, tidak ada beban janji politik yang harus segera dituntaskan oleh Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin. Pj Gubernur Jabar sifatnya hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan Gubernur Jabar definitif, Ridwan Kamil.

"Seperti melanjutkan pekerjaan, ritme yang sudah ada dan pekerjaan lainnya sesuai aturan yang ada, yang selanjutnya tentu Pj Gubernur Jabar dibatasi kewenangannya. Tidak semua hal bisa dilakukan oleh seorang Pj," tegas Sadar Muslihat.

Untuk diketahui, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023

tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota pada Bab III Pasal 15 disebutkan Penjabat Gubernur, Bupati hingga Penjabat Wali Kota dilarang; a. melakukan mutasi ASN

b. membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya,

c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, dan d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Dalam waktu yang berbeda, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru'yat memberikan arahan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar baru

yang belum lama resmi dilantik, Barnas Adjidin.

Arahan tersebut disampaikan Achmad Ru'yat saat rapat struktural Sekretariat DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu (6/9).

Arahan Achmad Ru'yat tersebut salah satunya, meminta Sekretariat DPRD Jawa Barat, Barnas Adjidin bekerja baik dan optimal. Kemudian, bisa melengkapi atau bersinergi dengan seluruh bagian di Sekretariat DPRD Jawa Barat. Termasuk bersinergi dengan pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat.

"Selamat datang dan selamat bertugas, Sekretaris DPRD Jawa Barat baru, Barnas Adjidin agar bekerja baik, bisa saling melengkapi antara satu sama lain antar bagian (di Sekretariat DPRD Jawa Barat), dan dengan pimpinan atau anggota DPRD Jawa Barat," pinta Achmad Ru'yat, Bandung, Rabu (6/9).

"Semoga Sekretaris DPRD Jawa Barat Pak Bar-

nas Adjidin yang baru dilantik agar bekerja dengan egaliter, tulus, inovatif dan sesuai prosedur atau aturan yang ada," sambung dia.

Sebagai Sekretaris DPRD Jawa Barat yang mempunyai tugas melayani dewan, diharapkan bisa berkomunikasi baik atau berkoordinasi dalam segala hal dengan DPRD Jawa Barat.

"Terlebih yang berkaitan pelayanan kepada DPRD Jawa Barat, harus selalu mengkomunikasikan dengan baik," tambah Achmad Ru'yat.

Untuk diketahui, Barnas Adjidin menggantikan Ida Wahida Hidayati sebagai Sekretaris DPRD Jawa Barat. Proses serah terima jabatan Ida Wahida Hidayati kepada Barnas Adjidin dilaksanakan di lobi ruang paripurna DPRD Jawa Barat, Bandung, Senin (4/9). ● **lys**



Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru'yat (kanan) bersama Sekretaris DPRD Jawa Barat, Barnas Adjidin (tengah) dan Kepala Bagian (Kabag) Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Jawa Barat Arip Ahmad Ripai (kiri), Bandung, Rabu (6/9).

Soal Laporan Izin PPLH Pengusaha di Serang, DLH Diminta Jemput Bola

SERANG (IM) - Wali Kota Serang, Syafrudin meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang lakukan jemput bola untuk memantau laporan pengusaha terkait izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Syafrudin, di Serang, Banten, Kamis (7/9) mengatakan, laporan perkembangan dari para pengusaha ini persemester setahun dua kali harus dilakukan untuk dilakukan pemantauan berkelanjutan.

"Karena bagaimana kita bisa memantau kalau tidak ada laporan. Ini juga harus dijemput bola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sehingga kita tahu perkembangan para pengusaha di Kota Serang," katanya.

Syafrudin mengatakan, ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Kota Serang dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Kota Serang.

"Saya menekankan para pengusaha di Kota Serang harus dengan izin yang lengkap. Karena kalau sudah ada izinnya berarti itu sudah sesuai dengan peruntukannya," katanya.

Menurutnya, peraturan lingkungan ini yang akan menentukan kenyamanan para pengusaha yang di Kota

Serang. Karena tanpa adanya persetujuan lingkungan maka para pengusaha akan sulit membuka usaha di Kota Serang sehingga perlu adanya koordinasi baik dengan lingkungan.

"Ada juga laporan yang para pengusaha ini yang membandel tidak menyampaikan laporannya maknanya ini harus dijemput bola oleh DLH," katanya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Serang Farah Rihli mengatakan kurang lebih ada sebanyak 300 pelaku usaha di Kota Serang, mulai dari industri, peternakan, rumah sakit, pergudangan, kampus, SPBU, hotel, dan tempat wisata.

"Kita targetkan minimal 90 Persen pelaporan yang dihasilkan agar dapat mengetahui keadaan lingkungan bagaimana kita juga langsung survei ke lapangan," katanya.

Ia mengatakan sejauh ini baru ada 70 persen perusahaan yang melaporkan izin PPLHnya, bahkan beberapa di antara lainnya tidak memiliki surat izin.

"Dari beberapa pelaku usaha tersebut ada yang belum melaporkan, jangkannya melapor surat izinnya juga tidak ada, ini sedang kita lakukan pengawasan," katanya. ● **pra**

Dinilai Mengganggu, Warga Lebak Minta Atribut Kampanye Ditertibkan

LEBAK (IM) - Pemilihan Umum (Pemilu) serentak akan digelar pada 2024, namun saat ini atribut menjelang pesta demokrasi empat tahun sekali ini sudah banyak atribut sepanduk yang tersebar di beberapa wilayah Rangkasbitung dan sekitarnya.

Bahkan banyak atribut juga yang mengganggu kenyamanan dan ditempelkan pada pohon serta samping jalan.

Warga Kecamatan Kalan-ganyar, Enjang Rojali, mendo-rong Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menertibkan atribut kampanye Pemilu tahun 2024.

Menurutnya banyak alat peraga kampanye itu dipasang tidak sesuai dengan tempatnya, maka harus ada tindakan dari kedua lembaga tersebut lantaran melanggar Perda K3.

"Saya kira ini harus ada tindakan dari Pol PP tingkat Provinsi atau Kabupaten Kota sebagai pelaksana Perda K3 berkolaborasi dengan Pengawas Pemilu," katanya, Kamis (7/9).

Enjang juga meminta ada evaluasi dari Bawaslu, untuk Bakal Calon yang sudah mencuri start kampanye, karena berdasarkan agenda untuk peraturan kampanye akan dimulai pada 28 November 2024.

"Mereka juga kan baru bakal calon, nanti ada tahapan verifikasi KPU, apakah pasti mereka lolos? kan belum tentu, jadi disayangkan khawatir amunisinya habis sebelum berperang," paparnya.

"Sosialisasi diri boleh untuk pencitraan, tapi kan harus dengan etika, adab tidak merusak dan melanggar aturan, apalagi mereka calon pejabat publik yang harus berkarakter Pancasila dan menjadi role model masyarakat," sambungnya.

Menanggapi banyaknya atribut sepanduk yang mengganggu, Ketua Bawaslu Lebak, Dedi Hidayat, mengatakan untuk aturan memang sudah dan itu dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

"Cumanya memang yang menurunkan Pol PP, kita istilahnya kita hanya melakukan Imbauan. Baik kepadanya peserta pemilu dan juga partainya," kata Dedi.

Dedi menyampaikan, setiap Panwascam yang ada di beberapa kecamatan juga sudah melakukan imbauan tersebut agar atribut tidak mengganggu fasilitas umum terlebih yang terpasang di samping jalan.

"Saat ini kita lakukan pendataan, akan ditertibkan melakukan Perda K3 dan akan ditertibkan pada sepanduk yang mengganggu tersebut," ucapnya. ● **pra**